

Integrasi Ilmu dan Transdisiplinaritas dalam Praktik *Wahdatul 'Ulum* di UIN Sumatera Utara

Muhammad Fadhli Azmi¹, Solihah Titin Sumanti², Muhammad Riduan Harahap³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; muhammad331253057@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; solihahtitinsumanti@uinsu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; mridwanharahap@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Integrasi Ilmu;
Studi Islam
Transdisipliner;
Wahdatul 'Ulum

Article history:

Received 2025-11-10

Revised 2025-11-12

Accepted 2025-11-17

ABSTRACT

This study examines the understanding of the academic community and the practical implementation of the *wahdatul 'ulum* paradigm at the State Islamic University (UIN) of North Sumatra as a manifestation of knowledge integration within the framework of a Transdisciplinary Islamic Studies Approach. The background of this research refers to the epistemological transformation following the institutional transition from IAIN to UIN, which necessitates the unification of religious and general sciences under a single vision of *tawhid*. The study aims to explore the social-academic realities as experienced and understood by actors within UIN North Sumatra concerning the implementation of the *wahdatul 'ulum* paradigm. This research employs a qualitative method with a phenomenological approach and data collection techniques through in-depth interviews with three main informants: a lecturer who manages the *wahdatul 'ulum* paradigm unit, lecturers from different faculties, and students. The findings indicate that although *wahdatul 'ulum* has been institutionally adopted through curricular policies—such as its integration into the Semester Learning Plan (RPS) and the establishment of the *Wahdatul 'Ulum* Unit—its implementation remains procedural and textual. Non-uniform understanding among lecturers, limited paradigmatic competence, and the dominance of a dichotomous academic culture hinder transformative internalization. The implications of these findings suggest that without competency standardization, continuous training, and a holistic transdisciplinary curriculum design, this paradigm risks becoming an administrative slogan that inadvertently reinforces the very dichotomy it aims to overcome. This study recommends strengthening institutional commitment to making *wahdatul 'ulum* not only a policy but an “epistemological axis” embedded in all academic practices.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Fadhli Azmi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; muhammad331253057@uinsu.ac.id

1. INTRODUCTION

Transformasi institusional dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) di berbagai wilayah Indonesia bukan sekadar

perubahan nama atau status akademik, melainkan sebuah lompatan epistemologis yang membawa implikasi mendalam terhadap struktur, visi, dan praktik keilmuan di lingkungan perguruan tinggi Islam. Di UIN Sumatera Utara, transformasi ini menandai lahirnya sebuah paradigma baru yang dikenal sebagai *wahdatul 'ulum*, yaitu suatu visi integratif yang berupaya menyatukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam satu kerangka ontologis yang utuh dan bertumpu pada prinsip tauhid. Paradigma ini tidak hanya menjadi respons terhadap tuntutan regulasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi juga merupakan upaya merekonstruksi kembali relasi antara ilmu pengetahuan dan iman dalam konteks peradaban Islam kontemporer. Namun, seperti banyak paradigma transformatif lainnya, *wahdatul 'ulum* menghadapi tantangan serius dalam proses internalisasi dan implementasinya di tingkat operasional, terutama dalam kurikulum, metode pengajaran, dan budaya akademik sehari-hari. Artikel ini berusaha menggali lebih dalam praktik penerapan *wahdatul 'ulum* di UIN Sumatera Utara melalui pendekatan fenomenologis dengan lensa Studi Islam Transdisipliner, guna memahami sejauh mana paradigma ini benar-benar menjadi “jiwa” perguruan tinggi Islam modern, bukan sekadar retorika administratif (M. Tanjung dkk., 2022).

Konsep *wahdatul 'ulum* berakar pada keyakinan teologis bahwa ilmu pengetahuan, dalam segala manifestasinya, bersumber dari satu sumber utama: Allah SWT. Ayat al-Qur'an surah al-Ahqaf: 23 yang berbunyi “*Innamal 'ilmu 'inda Allāh*” (Sesungguhnya ilmu itu hanya pada sisi Allah) menjadi fondasi ontologis yang tak terbantahkan bagi paradigma ini. Dari perspektif ini, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum; keduanya hanyalah ekspresi berbeda dari kebenaran Ilahi yang tunggal (Anwar dkk., 2025). Dalam sejarah intelektual Islam klasik, tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Rusyd tidak pernah memisahkan filsafat dari teologi, astronomi dari metafisika, atau kedokteran dari etika. Mereka memandang ilmu sebagai satu kesatuan yang mengalir dari kesadaran akan ke-Esa-an Sang Pencipta (Uyuni dkk., 2025). Krisis dikotomi ilmu yang muncul di era modern justru dianggap sebagai bentuk deviasi dari paradigma tauhidik tersebut. Oleh karena itu, *wahdatul 'ulum* bukan inovasi baru, melainkan revitalisasi dari tradisi keilmuan Islam yang otoritatif namun terlupakan.

Akan tetapi, revitalisasi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia lahir dalam konteks pergulatan institusional yang kompleks. Di satu sisi, negara melalui Kementerian Agama mengamankan setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk mengadopsi paradigma integrasi ilmu sebagai prasyarat transformasi menjadi universitas (Yunita, 2025). Di sisi lain, realitas akademik di lapangan masih dipengaruhi oleh struktur kurikulum lama yang dikotomis, dosen yang belum siap secara paradigmatis, serta mahasiswa yang belum memahami esensi filosofis dari *wahdatul 'ulum*. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa meskipun unit khusus

wahdatul 'ulum telah dibentuk di UIN Sumatera Utara, pemahaman masyarakat kampus terutama mahasiswa tentang paradigma ini masih sangat beragam, bahkan cenderung kabur. Banyak yang menganggapnya sebagai program tambahan atau sekadar materi pengayaan dalam mata kuliah tertentu, bukan sebagai paradigma pengorganisasi seluruh kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. Bahkan di kalangan dosen, interpretasi tentang bagaimana mengintegrasikan ilmu masih bersifat *ad hoc* dan tidak seragam, sehingga menghasilkan praktik integrasi yang bersifat simbolis atau tekstual, bukan transformatif. Menurut Sugiyono, hal ini disebut dengan *empirical gap* yang muncul ketika terdapat ketidakselarasan antara konsep yang ingin diterapkan dengan kondisi lapangan dengan SDM yang belum memiliki tingkat pemahaman searah terkait implementasi paradigma *wahdatul 'ulum*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik nyata penerapan *wahdatul 'ulum* di UIN Sumatera Utara dengan pendekatan fenomenologis. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana pengalaman langsung para akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam menghayati dan mengimplementasikan paradigma ini. Melalui wawancara mendalam dengan pengurus unit *wahdatul 'ulum* dan sejumlah informan kunci, penelitian ini berupaya merekonstruksi makna yang dibangun oleh para pelaku terhadap paradigma integrasi ilmu, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses internalisasinya. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti memasuki dunia pengalaman subjektif para informan, sehingga dapat menangkap realitas praktik *wahdatul 'ulum* bukan dari sudut pandang eksternal, melainkan dari dalam yaitu bagaimana ia dirasakan, dipahami, dan dilakukan sehari-hari.

Urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga nasional dan bahkan global. Secara lokal, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan UIN Sumatera Utara dalam menyusun kebijakan pengembangan kurikulum, pelatihan dosen, dan sosialisasi paradigma. Secara nasional, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap diskursus integrasi ilmu yang sedang bergulir di seluruh PTKI di Indonesia. Secara konseptual, *wahdatul 'ulum* dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai sekadar penyisipan ayat al-Qur'an atau hadis ke dalam materi kuliah sains, melainkan sebagai transformasi paradigmatis dalam cara memandang, memproduksi, dan memvalidasi ilmu. Dalam kerangka transdisipliner, ilmu tidak lagi dilihat sebagai entitas terpisah yang dikurung dalam disiplin akademik, melainkan sebagai jaringan pengetahuan yang saling terkait dan bermuara pada tujuan kemanusiaan yang holistik.

Dengan demikian, pendahuluan ini tidak hanya mengantarkan pada permasalahan teknis, tetapi juga pada pertarungan epistemologis yang lebih luas: apakah perguruan tinggi Islam mampu menjadi pelopor peradaban ilmu yang utuh, atau justru terjebak dalam dualisme yang melemahkan. Jawaban atas pertanyaan ini

hanya dapat ditemukan melalui investigasi empiris yang mendalam, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Melalui analisis fenomenologis atas praktik *wahdatul 'ulum* di UIN Sumatera Utara, penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran jujur sekaligus konstruktif tentang sejauh mana paradigma integrasi ilmu telah menjadi nyata dalam kehidupan akademik, serta bagaimana ia dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka Studi Islam Transdisipliner yang relevan dengan tantangan zaman.

2. METHODS

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali realitas sosial-akademik sebagaimana dialami dan dipahami oleh para pelaku di lingkungan UIN Sumatera Utara terkait penerapan paradigma *wahdatul 'ulum*. Penelitian ini dilakukan pada selama 3 bulan (Mei-Agustus 2023) di UIN Sumatera Utara, khususnya unit-unit akademik yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan *wahdatul 'ulum*, termasuk Unit Pengembangan *Wahdatul 'ulum*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu Sosial. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan primer dari penelitian ini adalah salah seorang pengembang/ pengurus unit *wahdatul 'ulum* UIN Sumatera Utara, 3 orang dosen dari fakultas yang variatif, serta mahasiswa, sementara informan sekunder adalah perwakilan masyarakat di lingkungan sekitar kampus UIN Sumatera Utara. Observasi digunakan untuk mengamati sejauh mana *wahdatul 'ulum* sebagai konsep paradigma diterapkan dalam ruang kelas, riset dan pengabdian (Tri Dharma perguruan tinggi), dan analisis dokumen untuk memeriksa dokumen yang relevan terkait penerapan *wahdatul 'ulum*. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, dilakukan *crosscheck* dan triangulasi data.

Sebagai penelitian empiris, fokus utamanya bukan pada spekulasi filosofis atau analisis dokumen semata, melainkan pada pengalaman langsung individu-individu yang terlibat dalam proses internalisasi dan implementasi paradigma tersebut, baik sebagai pengelola, pengajar, maupun penerima (mahasiswa). (Efendi & Rijadi, 2022, hlm. 128) Dengan demikian, data dikumpulkan melalui interaksi langsung di lapangan, bukan dari sumber sekunder atau teks normatif saja. Dalam hal ini, peneliti tidak menilai apakah implementasi *wahdatul 'ulum* "benar" atau "salah", tetapi berupaya memahami bagaimana para akademisi memberi makna terhadap praktik tersebut.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1 Urgensi dan Konsep *Wahdatul 'Ulum* dalam Kerangka Studi Islam Transdisipliner

Praktik paradigma *wahdatul 'ulum* di UIN Sumatera Utara tidak dapat dipahami secara utuh tanpa terlebih dahulu menelusuri fondasi filosofis, teologis, dan epistemologis yang melandasinya. Konsep *wahdatul 'ulum*, yang secara harfiah berarti “kesatuan ilmu-ilmu”, bukan sekadar gagasan akademik yang lahir dari kebutuhan administratif transformasi institusional, melainkan manifestasi dari prinsip tauhid yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam perspektif tauhid, seluruh realitas yang bersifat fisik maupun metafisik, berasal dari satu sumber yang tunggal: Allah SWT. Ayat al-Qur'an surah al-Ahqaf ayat 23, “*Innamal 'ilmu 'inda Allāh*” (Sesungguhnya ilmu itu hanya di sisi Allah), menjadi landasan ontologis yang tak terbantahkan bagi paradigma ini. Ayat ini tidak hanya menegaskan kepemilikan mutlak Allah atas seluruh bentuk pengetahuan, tetapi juga menolak secara implisit dikotomi antara ilmu “agama” dan ilmu “duniawi”. Jika seluruh ilmu berasal dari Allah, maka memisahkan satu jenis ilmu dari yang lain berarti memecah realitas kebenaran yang oleh hakikatnya utuh sehingga menjadi suatu tindakan yang secara epistemologis inkonsisten dan secara teologis berpotensi merusak akidah. Sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang pengurus Unit *Wahdatul 'ulum* UIN Sumatera Utara dalam wawancara, “Ketika kita memisahkan saintek sebagai ilmu yang berbeda dan tidak bersumber dari Allah, di hadapan Allah kita secara tidak langsung dikatakan murtad dalam bahasa *wahdatul 'ulum*, batal akidahnya.” Pernyataan tegas ini menunjukkan bahwa *wahdatul 'ulum* bukan isu sekunder dalam pendidikan tinggi Islam, melainkan urusan prinsip keimanan yang menyangkut integritas tauhid.

Secara institusional, urgensi *wahdatul 'ulum* semakin diperkuat oleh tuntutan regulasi nasional. Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019, secara eksplisit mewajibkan seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk mengimplementasikan integrasi ilmu dalam seluruh aspek Tri Dharma perguruan tinggi. Hal ini bukan hanya kebijakan birokratis, tetapi respons terhadap kebutuhan mendesak akan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kokoh (Budiyono dkk., 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mohammad Al Farabi selaku dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sekaligus pengembang *Wahdatul Ulum* di UIN Sumatera Utara, menegaskan bahwa “Kalau ada perguruan tinggi yang belum mengintegrasikan ilmu, itu tergolong perguruan tinggi yang tidak mengindahkan agama dan regulasi dari pemerintah kita” (M. A. Farabi, komunikasi pribadi, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa *wahdatul 'ulum* kini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban institusional yang mengikat. Namun, tantangannya justru terletak pada pergeseran dari “kewajiban formal” menjadi

“komitmen substantif”. Banyak perguruan tinggi memenuhi regulasi ini secara administratif, tetapi gagal menginternalisasi esensi filosofisnya dalam praktik akademik sehari-hari. Inilah yang menjadi titik kritis dalam penelitian ini: bagaimana *wahdatul ‘ulum* dipahami dan dihayati, bukan hanya dituliskan.

Konsep *wahdatul ‘ulum* dalam praktik di UIN Sumatera Utara mengalami evolusi terminologis dan epistemologis yang menarik. Dalam kerangka Studi Islam Transdisipliner, transdisiplineritas tidak hanya menghubungkan disiplin ilmu, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, etika, dan tujuan eksistensial dalam proses keilmuan. Studi Islam Transdisipliner menempatkan *al-haqq* (kebenaran Ilahi) sebagai poros epistemologis yang memungkinkan ilmu-ilmu modern diintegrasikan tanpa kehilangan komitmen pada nilai-nilai Islam (Harahap, 2019). Dalam konteks ini, *wahdatul ‘ulum* di UIN Sumatera Utara dapat dipahami sebagai wujud lokal dari transdisiplineritas Islam yang bersifat holistik dan kontekstual.

Pemahaman ini membawa implikasi penting terhadap cara *wahdatul ‘ulum* diimplementasikan. Integrasi ilmu bukan berarti menyisipkan ayat al-Qur’an atau hadis ke dalam materi kuliah sains secara mekanis. Integrasi yang otentik justru terjadi ketika seorang dosen fisika, misalnya, tidak hanya mengajarkan hukum Newton, tetapi juga merefleksikan bagaimana hukum tersebut mengungkap tanda-tanda kekuasaan Allah (*āyāt kauniyyah*) dan bagaimana ilmu fisika harus digunakan untuk keadilan dan kemaslahatan umat. Demikian pula, seorang dosen ekonomi tidak hanya mengajarkan teori pasar, tetapi juga mengkritiknya melalui prinsip keadilan (*‘adl*), larangan riba, dan konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam wawancara, informan utama memberikan contoh konkret: “Dosen mata kuliah Pancasila ini tidak boleh lagi mengajarkan Pancasila itu dalam perspektif kenegaraan dan kebangsaan saja. Dia harus relevansikan bahwa Pancasila itu relevan dengan ajaran Islam.” Contoh ini menunjukkan bahwa integrasi dimulai dari kesadaran bahwa setiap ilmu memiliki dimensi nilai yang dapat dikaitkan dengan prinsip Islam, asalkan dosen memiliki kompetensi paradigmatis yang memadai.

Namun, di sinilah tantangan utama muncul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang *wahdatul ‘ulum* di kalangan dosen masih sangat beragam. Banyak dosen yang mengajar integrasi ilmu sebenarnya “hanya paham agama”, tetapi “belum tentu mendalami *wahdatul ‘ulum* itu sendiri”. Akibatnya, implementasi integrasi ilmu menjadi tidak seragam, bahkan kontradiktif antar kelas. Satu mahasiswa memahami *wahdatul ‘ulum* sebagai penyisipan nilai, sementara yang lain memahaminya sebagai transformasi paradigma. Ketidakkonsistenan ini bukan hanya mengaburkan makna paradigma, tetapi juga berpotensi membingungkan mahasiswa dan mereduksi *wahdatul ‘ulum* menjadi sekadar formalitas kurikuler. Padahal, esensi *wahdatul ‘ulum* justru terletak pada kemampuannya untuk menjadi “kacamata” baru

dalam melihat dan memproduksi ilmu, bukan sebagai lapisan tambahan, melainkan sebagai fondasi ontologis yang mengubah cara kita memahami realitas.

Lebih dalam lagi, urgensi *wahdatul 'ulum* juga terkait dengan misi peradaban. UIN Sumatera Utara, seperti UIN lainnya, tidak hanya bertugas mencetak lulusan, tetapi juga menjadi garda depan dalam membangun peradaban Islam yang berbasis ilmu pengetahuan. Dalam era globalisasi dan krisis multidimensi, dunia membutuhkan ilmuwan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara spiritual. *Wahdatul 'ulum* menawarkan kerangka untuk melahirkan sosok tersebut: ilmuwan Muslim yang mampu menggabungkan keunggulan teknis dengan komitmen etis, inovasi intelektual dengan kepekaan sosial, dan kebebasan akademik dengan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, *wahdatul 'ulum* bukan hanya solusi untuk krisis dikotomi ilmu di lingkungan kampus, tetapi juga kontribusi Islam terhadap peradaban global yang sedang kehilangan arah nilai (Y. F. Tanjung, 2024).

Namun, semua potensi ini hanya akan menjadi realitas jika *wahdatul 'ulum* diinternalisasi secara sistemik dan berkelanjutan. Ini memerlukan komitmen institusional yang kuat—mulai dari pelatihan dosen, pengembangan kurikulum, hingga penilaian kinerja akademik yang berbasis integrasi ilmu. Tanpa itu, *wahdatul 'ulum* berisiko menjadi “paradigma hantu”: hadir dalam dokumen, tetapi absen dalam praktik. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UIN Sumatera Utara telah membuat langkah awal yang signifikan seperti membentuk Unit *Wahdatul 'ulum* dan mewajibkan integrasi dalam RPS, proses internalisasi masih dalam tahap awal dan menghadapi hambatan struktural maupun kultural. Namun, justru di sinilah signifikansi penelitian ini: untuk tidak hanya mendokumentasikan praktik, tetapi juga merefleksikannya secara kritis demi memperkuat komitmen terhadap visi *wahdatul 'ulum* sebagai paradigma transformatif, bukan sekadar jargon institusional.

3.2 Implementasi dan Hambatan Paradigma *Wahdatul 'ulum* di UIN Sumatera Utara

Sebagai bagian dari amanat Kementerian Agama Republik Indonesia, UIN Sumatera Utara tidak hanya mengadopsi *wahdatul 'ulum* sebagai visi keilmuan, tetapi juga menurunkannya ke dalam struktur operasional Tri Dharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh informan primer, “pengembangan paradigma *wahdatul 'ulum* di UIN Sumatera Utara merujuk kepada Tri Dharma perguruan tinggi,” realisasi paradigma ini di lapangan justru menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan epistemologis yang kompleks. Implementasi yang terjadi saat ini masih bersifat prosedural, namun belum sepenuhnya menyentuh dimensi transformasional

yang menjadi esensi sesungguhnya dari *wahdatul 'ulum* (M. A. Farabi, komunikasi pribadi, 2025).

Salah satu bentuk implementasi paling konkret adalah integrasi *wahdatul 'ulum* ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Setiap dosen diwajibkan memasukkan elemen integrasi ilmu dalam silabus mata kuliah masing-masing, baik itu mata kuliah agama maupun umum. Sebagaimana dijelaskan oleh informan, “dosen mata kuliah Pancasila ini tidak boleh lagi mengajarkan Pancasila itu dalam perspektif kenegaraan dan kebangsaan saja. Dia harus relevansikan bahwa Pancasila itu relevan dengan ajaran Islam. Itu salah satu pengintegrasian. Itu paling sederhana.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa integrasi dimulai dari level paling dasar: mengaitkan konten mata kuliah dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, bentuk integrasi seperti ini memang mudah diukur dan diawasi secara administratif, sehingga menjadi pilihan utama dalam tahap awal implementasi. Namun, pendekatan ini juga membuka risiko besar: integrasi tekstual dan simbolis yang tidak menyentuh akar paradigmatis. Ketika integrasi hanya berhenti pada penyisipan ayat al-Qur'an, hadis, atau kutipan nilai Islam tanpa refleksi kritis terhadap metodologi, asumsi ontologis, atau implikasi etis dari ilmu tersebut, maka *wahdatul 'ulum* berubah dari paradigma menjadi sekadar “tambahan etis” yang tidak mengganggu struktur epistemologi disiplin ilmu modern.

Masalah ini semakin krusial ketika diterapkan pada fakultas-fakultas baru yang dibuka pasca-transformasi menjadi UIN, seperti Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Keberadaan fakultas-fakultas ini justru menjadi ujian utama bagi komitmen terhadap *wahdatul 'ulum*. Sebagaimana ditegaskan dalam wawancara, “Keempat fakultas ini jika pada mata kuliah yang ada tidak diwarnai dengan integrasi ilmu yang sesuai dengan ajaran Islam, maka materi ajar tersebut menjadi ilmu yang sekuler. Hal ini tentu membahayakan segenap alumni UIN Sumatera Utara.” Pernyataan ini mengungkap kekhawatiran mendalam bahwa tanpa integrasi yang otentik, UIN berisiko melahirkan lulusan yang ahli secara teknis tetapi sekuler dalam pandangan dunia (*worldview*). Ilmu sains dan teknologi, yang dalam paradigma Barat sering dipisahkan dari nilai, bisa jadi digunakan tanpa pertimbangan akhlak, keadilan, atau tanggung jawab sosial—sesuatu yang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan visi peradaban Islam.

Namun, justru di sinilah letak tantangan terbesar: menemukan “benang merah” antara ilmu-ilmu umum yang bersifat teknis dan nilai-nilai Islam yang bersifat normatif. Informan mengakui bahwa “integrasi keilmuan yang dimaksud menuntut integrasi keilmuan ini juga diterapkan pada mata kuliah umum yang dapat dikatakan sulit dicari benang merah atas keterkaitan ilmu tersebut dengan konsep *wahdatul 'ulum*.” Misalnya, bagaimana seorang dosen statistik mengintegrasikan ilmu hitung probabilitas dengan prinsip tauhid? Atau bagaimana dosen rekayasa perangkat lunak

menanamkan nilai amanah dan *ihsān* dalam proses coding? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan menyisipkan ayat tentang kejujuran. Diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana setiap disiplin ilmu memiliki dimensi ontologis (apa realitas yang dikaji?), epistemologis (bagaimana ilmu itu diperoleh?), dan aksiologis (untuk apa ilmu itu digunakan?) (M. A. Farabi, komunikasi pribadi, 2025).

Sayangnya, kapasitas akademik untuk melakukan proses ini masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkifli Dalimunthe selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, menunjukkan bahwa “tidak semua mahasiswa UIN Sumatera Utara memahami konsep *wahdatul ‘ulum* yang sesuai,” dan “tidak semua mahasiswa yang pernah mempelajari konsep *wahdatul ‘ulum* antara satu sama lain yang berbeda kelompok belajar memiliki pemahaman yang searah”. Ketidakkonsistenan ini bukan tanpa sebab, ia bersumber pada ketidakseragaman pemahaman dan kompetensi para pengajar (Z. Dalimunthe, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025). Selain faktor kompetensi dosen, hambatan lain bersifat struktural dan kultural. Pertama, budaya akademik yang lama masih kuat. Banyak dosen senior terbiasa mengajar dalam silo disiplin ilmu mereka, dan melihat integrasi sebagai “gangguan” terhadap otoritas keilmuan mereka. Kedua, kurangnya dukungan infrastruktur seperti pusat studi integrasi ilmu, laboratorium transdisipliner, atau forum dialog antar-fakultas yang berkelanjutan. Tanpa ruang institusional untuk berkolaborasi, integrasi ilmu hanya menjadi tanggung jawab individual, bukan gerakan kolektif.

Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat pula faktor pendorong yang signifikan. Pertama, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap lulusan UIN. Masyarakat tidak lagi puas dengan lulusan yang hanya ahli agama atau hanya ahli teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat, beliau mengungkapkan bahwa masyarakat mengharapkan lulusan yang mampu menggabungkan keunggulan akademik dengan integritas moral. (S. Sutrisno, komunikasi pribadi, 12 Oktober 2025) Hal ini merupakan sebuah visi yang secara eksplisit disebutkan oleh rektor UIN Sumatera Utara sebagai salah satu alasan lahirnya paradigma *wahdatul ‘ulum*. Kedua, dukungan kebijakan nasional yang konsisten dari Kementerian Agama, termasuk pelatihan dosen, bantuan penyusunan RPS berbasis integrasi, dan insentif penelitian transdisipliner. Ketiga, keberadaan Unit *Wahdatul ‘ulum* sebagai lembaga khusus yang bertugas mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan mengevaluasi implementasi paradigma ini di seluruh fakultas. Meskipun kapasitasnya terbatas, keberadaan unit ini menunjukkan komitmen institusional yang serius. Menariknya, implementasi *wahdatul ‘ulum* juga membuka ruang untuk kritik internal terhadap praktik integrasi yang dangkal. Wawancara dengan informan utama menunjukkan kesadaran bahwa integrasi tidak

boleh dilakukan secara paksa atau artifisial. “Itu paling sederhana,” ujar beliau ketika menyebut contoh integrasi Pancasila-Islam, seolah mengakui bahwa bentuk integrasi tersebut hanyalah titik awal. Ini menunjukkan bahwa di kalangan pengelola paradigma, sudah muncul kesadaran bahwa integrasi harus berkembang dari level normatif ke level epistemologis, dari “menyisipkan nilai” ke “mengubah cara berpikir tentang ilmu”. Tantangannya adalah bagaimana mendorong seluruh civitas akademika, bukan hanya segelintir *elite*, untuk melakukan lompatan paradigmatik ini (M. A. Farabi, komunikasi pribadi, 2025).

Dalam hal Studi Islam Transdisipliner, hambatan implementasi *wahdatul ‘ulum* justru menjadi peluang untuk merefleksikan kembali makna “integrasi” itu sendiri. Transdisiplinaritas tidak hanya tentang menghubungkan disiplin ilmu, tetapi juga tentang mengakui adanya realitas berlapis yang saling berinteraksi (Wulandari, 2023). Dalam kerangka ini, *wahdatul ‘ulum* dapat dipahami sebagai upaya membangun epistemologi Islam yang multi-level, di mana ilmu fisika, misalnya, tidak hanya membahas partikel dan gelombang, tetapi juga merefleksikan bagaimana fenomena tersebut menjadi tanda kebesaran Allah (*āyāt kauniyyah*) dan bagaimana pengetahuan tersebut harus digunakan untuk menjaga keseimbangan alam (*mīzān*). Integrasi yang demikian tidak memerlukan “pemaksaan” nilai, tetapi muncul secara alami dari kesadaran ontologis bahwa seluruh realitas adalah manifestasi dari kehendak Ilahi.

Namun, untuk mencapai tingkat integrasi ini, UIN Sumatera Utara perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Pertama, standarisasi kompetensi dosen melalui pelatihan intensif berbasis modul integrasi ilmu yang kontekstual per disiplin. Kedua, pengembangan kurikulum transdisipliner yang tidak hanya mengintegrasikan konten, tetapi juga merancang mata kuliah lintas fakultas yang berbasis masalah nyata (*problem-based learning*), seperti “Etika Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Islam” atau “Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Prinsip Keadilan Islam”. Ketiga, penguatan riset transdisipliner yang melibatkan kolaborasi antara dosen saintek, sosial, dan agama dalam menangani isu-isu lokal seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesehatan masyarakat. Keempat, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas implementasi *wahdatul ‘ulum*, bukan hanya dari sisi dokumen, tetapi dari dampaknya terhadap cara berpikir dan bertindak mahasiswa.

Dengan demikian, implementasi *wahdatul ‘ulum* di UIN Sumatera Utara bukanlah proyek yang bisa diselesaikan dalam lima atau sepuluh tahun, melainkan proses peradaban yang membutuhkan komitmen jangka panjang, kesabaran epistemologis, dan keberanian institusional. Hambatan yang ada bukan alasan untuk mundur, tetapi justru menjadi bahan refleksi untuk memperdalam dan memperluas praktik integrasi ilmu. Jika UIN Sumatera Utara berhasil mengatasi tantangan ini, maka ia tidak hanya menjadi contoh bagi PTKI lain di Indonesia, tetapi juga kontributor penting bagi

diskursus global tentang transdisiplinaritas dan alternatif epistemologi yang berbasis nilai.

4. CONCLUSION

Wahdatul 'ulum di UIN Sumatera Utara bukan sekadar kebijakan administratif atau respons formal terhadap regulasi Kementerian Agama, melainkan ekspresi epistemologis dari prinsip tauhid yang menuntut integritas ontologis dalam seluruh bentuk pengetahuan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun paradigma ini telah diadopsi secara institusional, terutama melalui integrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester dan pembentukan unit khusus, implementasinya masih terhambat oleh kesenjangan antara visi transformatif dan realitas operasional. Pemahaman yang beragam di kalangan dosen, kurangnya kompetensi paradigmatis, serta dominasi struktur disipliner lama menyebabkan praktik integrasi cenderung tekstual dan simbolis, bukan transformatif.

Dalam Studi Islam Transdisipliner, hal ini mengungkap tantangan mendasar: bagaimana mengubah *wahdatul 'ulum* dari slogan menjadi cara berpikir, mengajar, dan memproduksi ilmu yang utuh. Implikasinya jelas tanpa internalisasi yang sistemik dan mendalam, paradigma ini berisiko kehilangan maknanya dan justru memperkuat dikotomi yang ingin diatasi. Oleh karena itu, kelangsungan *wahdatul 'ulum* tidak ditentukan oleh keberadaan dokumen kebijakan, tetapi oleh kemampuan institusi untuk mengubah budaya akademik, melatih kompetensi transdisipliner, dan menempatkan tauhid bukan hanya sebagai fondasi teologis, melainkan sebagai poros epistemologis yang hidup dalam setiap ruang kelas, riset, dan pengabdian.

REFERENCES

- Anwar, W. T. L., Asmadi, S. Z., Handayani, I., Pratama, I. P., Daulay, H., & Dahlan, Z. (2025). Implementasi Nilai-nilai Wahdatul 'Ulum dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1), 587–598.
- Budiyono, A., Haris, Abd., Antika, L. T., Wildani, A., & Hotimah, H. (2025). Model Pendidikan Berbasis Lima Menara Ilmu: Kajian Integrasi Nilai Keislaman, Keindonesiaan, Kemaduraan, Kepesantrenan, dan Keaswajaan dalam Pembelajaran Sains. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1743–1755.
- Dalimunthe, Z. (2025, Juni 10). *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Wahdatul 'Ulum* [Wawancara Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2 ed.). Kencana.

- Farabi, M. A. (2025). *Eksistensi Wahdaul 'Ulum di Lingkungan Kampus UIN Sumatera Utara* [Wawancara Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Harahap, M. R. (2019). Integrasi Ilmu Pengetahuan: Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Hibrul 'Ulama*, 1(1), 1–17.
- Sutrisno, S. (2025, Oktober 12). *Faktor Pendorong Terhadap Perkembangan Keilmuan Wahdatul 'Ulum* [Wawancara di Kecamatan Medan Sunggal].
- Tanjung, M., Muniruddin, & Rangkuti, B. A. F. (2022). Penerapan Paradigma Wahdatul Ulum dalam Pembelajaran di Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi adn Kajian Islam*, 9(2), 112–122.
- Tanjung, Y. F. (2024). Implementation of the Concept of Wahdatul Ulum in Self—Management Towards the Formation of Insan Kamil. *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies*, 3.
- Uyuni, B., Pratama, S., Jubaidah, W., Saefulloh, A., Nulyaman, I., Hartati, Z., Rais, F., & Iim. (2025). *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Get Press Indonesia.
- Wulandari, T. (2023). Transintegration of Science: Bridging Knowledge Boundaries in Realizing Knowledge Harmony. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 3(1), 1–25.
- Yunita, Y. (2025). *Model Integrasi Ilmu dan Islam dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Karya Buku dan Jurnal Indonesia.